

MENGULIK SEJARAH PENERAPAN DWIFUNGSI ABRI PADA MASA ORDE BARU

Tazkia Kamila Sofuan

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Email: tkamilas@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejarah awal tercetusnya konsep Dwifungsi ABRI yang dipelopori oleh Jenderal A.H. Nasution, kemudian menjelaskan tentang penerapan konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas lima tahapan seperti pemilihan topik, heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini yakni tentang awal mula terciptanya pemikiran A.H. Nasution yang mendasari tercetusnya konsep Dwifungsi ABRI. Kemudian membahas tentang alasan penerapan konsep Jalan Tengah pada masa Orde Lama yang kemudian juga diterapkan pada masa Orde Baru yang dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI. Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui awal mula keterlibatan militer dalam kancah politik, untuk mengetahui bentuk penyimpangan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Selain itu, untuk mengetahui penyebab hubungan antara sipil dan militer yang tidak harmonis sehingga perlu diperbaiki karena hubungan antara sipil dan militer merupakan sebuah kunci stabilitas pemerintahan suatu negara.

Kata Kunci: *Dwifungsi ABRI, A.H. Nasution, Orde Baru*

A. PENDAHULUAN

Peran militer tidak dapat terpisahkan dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka. Hubungan militer sangat erat kaitannya dengan kelompok masyarakat khususnya ketika terjadinya revolusi rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Adanya militer menjadi sebuah kekuatan bagi negara dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan supaya terhindar dari berbagai macam bentuk ancaman baik itu dari dalam maupun luar. Eksistensi militer juga sangat diperlukan untuk melindungi negara yang baru merdeka dari ancaman bangsa kolonial yang berusaha untuk menduduki Indonesia kembali. Keberadaan militer sejak setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia turut serta ketika terjadinya konstelasi dan percaturan politik. Ketika peristiwa tersebut terjadi militer juga telah mengambil langkah yang tepat untuk menempatkan peran dan posisinya sebagai tentara kemerdekaan.

Setelah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949 Indonesia berubah menjadi negara federasi atau RIS (Republik Indonesia Serikat). Bersamaan dengan diubahnya bentuk negara

Indonesia menjadi negara federasi, dibentuklah Angkatan Perang RIS atau yang dikenal dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Menurut Supriyatmono (dalam Putra, et al. 2021) bahwa setelah kemerdekaan terjadi transformasi perubahan bentuk negara pada tahun 1950 menjadi NKRI dimana militer berdiri secara kuat di belakangnya. Pada saat itu angkatan militer yang semula merupakan angkatan perang kemudian diubah namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Diubahnya angkatan perang menjadi angkatan bersenjata dikarenakan pemerintah melakukan penyatuan atau penggabungan angkatan perang dengan tim kepolisian untuk melaksanakan perannya sesuai dengan cita-cita negara serta menghindari adanya pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Dalam kancah perpolitikan Indonesia, militer juga turut andil di dalamnya sejak awal berdirinya negara Indonesia ini. Pengambilan kebijakan politik yang semestinya merupakan tanggung jawab dari para aparat sipil namun, militer juga turut andil di dalamnya. Peran sosial politik dari militer ini awalnya terjadi pada saat diberlakukannya sistem pemerintahan

Demokrasi Terpimpin di Indonesia pada era Soekarno (Anwar, 2018a). Pada masa sebelumnya militer belum terlibat dalam kehidupan sosial politik negara Indonesia, melainkan politisi sipil yang paling dominan ketika mengendalikan roda pemerintahan. Namun, setelah dicetuskannya konsep Dwifungsi ABRI militer dapat memperoleh peranannya tidak hanya pada bidang pertahanan dan keamanan saja, namun militer juga berperan dalam bidang sosial dan politik. Konsep Dwifungsi ABRI ini dicetuskan oleh Jenderal Besar A.H. Nasution dimana Dwifungsi ABRI ini dicetuskan supaya ketika merumuskan sebuah kebijakan maka politisi sipil dan juga kalangan militer turut terlibat dalam proses perumusan, pembahasan, dan pengambilan keputusan politik, karena ketika proses pengambilan keputusan maka harus dilakukan secara cermat. Disisi lain tujuan tersebut juga dilakukan supaya hubungan antara para politisi sipil dan militer dapat terjalin harmonis dan tidak mengalami ketegangan yang dapat menyebabkan pertikaian di dalam negeri.

Pada masa Orde Lama militer telah dekat dengan pemerintah namun, konsep Dwifungsi ABRI ini masih dilakukan sesuai dengan rencana awalnya. Akan tetapi, pada masa Orde Baru inilah yang menjadi puncaknya dimana hubungan antara sipil dan militer semakin mengalami ketegangan dari diberlakukannya konsep Dwifungsi ABRI. Pada masa Orde Baru peranan dari militer menjadi kuat dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan dimana seharusnya militer hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan saja, namun pada masa ini militer memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam mengatur negara (Hilal, et al. 2022). Tulisan ini akan menjelaskan tentang konsep Dwifungsi ABRI pada awal dicetuskannya, kemudian membahas tentang penerapan Dwifungsi ABRI khususnya pada masa Orde Baru. Selain itu untuk mengetahui dampak diterapkannya Dwifungsi ABRI dalam konstelasi politik militer yang ada di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mana di dalam metode tersebut terdapat beberapa langkah di dalamnya yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap awal penulisan jurnal ini langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pemilihan topik. Topik yang diangkat oleh peneliti yakni tentang pemikiran dari A.H. Nasution terkait dengan Dwifungsi ABRI. Setelah itu, peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung topik yang sedang dibahas oleh peneliti atau yang sering disebut sebagai tahapan heuristik. Tahapan heuristik ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber pendukung yang digunakan untuk mendukung pendapat peneliti, sehingga nantinya dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya (Sayono, 2021). Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi pustaka untuk memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan. Studi pustaka menurut Harahap (dalam Istiqomah et al. 2022) yaitu data-data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini berasal dari perpustakaan atau sumber-sumber literatur seperti artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Setelah peneliti memperoleh sumber-sumber pendukung maka perlu dilakukannya suatu kritik sumber atau yang disebut sebagai verifikasi. Kritik sumber atau verifikasi dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji autentisitas sumber yang diperoleh untuk memperkuat gagasan dari seorang peneliti. Setelah itu, dilakukan kritik internal dimana data-data yang telah ditemukan ini dilakukan penyuntingan sehingga, dapat diketahui bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian ini kredibel dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak (Nisa, 2023). Selanjutnya setelah dilakukannya kritik sumber kemudian peneliti melakukan tahapan interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan penafsiran terhadap data-data yang telah melalui tahapan kritik sumber kemudian disusun menjadi fakta-fakta sejarah

yang saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga nantinya akan dihubungkan serta dibandingkan antara satu dengan yang lainnya (Fitri and Susanto, 2021). Fakta-fakta yang telah dikaitkan tadi kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti serta disusun secara kronologis sehingga mampu memberikan gambaran yang lengkap untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang sebenarnya. Setelah itu peneliti melakukan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah yakni historiografi. Historiografi merupakan penguraian hasil penelitian sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi sejarah oleh peneliti dimana narasi sejarah tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan penelitian dari mulai perencanaan hingga penarikan kesimpulan (Nisa, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dwifungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI diciptakan oleh Jenderal A.H. Nasution yang terinspirasi dari pemikiran seorang jenderal perang dari Prusia yakni Karl von Clausewitz (Putra, et al. 2021). Karl von Clausewitz sangat memberikan inspirasi bagi A.H. Nasution karena ia merupakan tokoh penting yang ahli dalam strategi militer sehingga sangat disegani oleh siapapun. Karl von Clausewitz mengaitkan pemikirannya tentang perang dengan aspek-aspek kehidupan lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Clausewitz memiliki pandangan bahwa perang dapat menjadi alat untuk tindakan politik melalui cara lain bukan sebagai aktivitas militer saja. Politik dan militer sama halnya dengan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi berbeda karena keduanya dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Hal itulah yang kemudian membuat A.H. Nasution terinspirasi dengan pemikiran dari Clausewitz dan mencoba untuk digunakan sebagai dasar penguat pemikirannya.

Adanya pemikiran dari Clausewitz tersebut kemudian Jenderal A.H. Nasution memberikan asumsinya dengan membuat gambaran terkait hubungan antara sipil dan militer. Gambaran tersebut yakni hubungan antara sipil dan militer harus dilakukan suatu kerja sama yang selaras dan harmonis. Tidak

ada batasan di antara keduanya dalam artian militer berhak mengetahui dan diikuti sertakan ketika proses perumusan dan pemutusan kebijakan politik pemerintahan. Ketika negara mengambil suatu kebijakan maka perlu secara cermat meminta pertimbangan dari ABRI karena, suatu kebijaksanaan negara yang ideal penting untuk meminta pertimbangan dari ABRI sebagai aparat keamanan negara. Selain itu, Jenderal A.H. Nasution juga menyatakan bahwa ABRI juga berhak untuk diikutsertakan dalam lembaga negara baik yang bersifat eksekutif maupun legislatif. ABRI juga berkeinginan supaya keikutsertaannya tersebut diakui secara mutlak dalam kabinet dan Dewan Nasional (Putra, et al. 2021). Hal itu diharapkan supaya seluruh aparat pemerintahan dan masyarakat mengakui bahwa ABRI memiliki posisi penting dalam pengambilan kebijakan politik negara.

Konsep Jalan Tengah ini dicetuskan oleh A.H. Nasution untuk memberikan batasan bagi tentara ketika mengambil peranannya dalam berbangsa dan bernegara. Jalan Tengah ini hanya menempatkan tentara sebagai wakil dari organisasi militer untuk diikuti sertakan pada pengambilan kebijakan negara tingkat tinggi. Militer sangat membatasi peranannya supaya tetap berada dalam koridor otonomi yang telah ditetapkan dan berusaha mengantisipasi agar tidak ditunggangi oleh siapapun khususnya para elit politik untuk dijadikan sebagai alat dalam mencapai kepentingan golongan. Seperti pernyataan dari Said (dalam Rizqi, 2020) Nasution mengatakan bahwa tentara Indonesia tidak akan pernah meniru negara-negara yang ada di Eropa menjadikan tentara sebagai permainan politik dan tentara menjadi alat yang mati. Konsep ini menjadi pedoman bagi tentara untuk tidak menguasai perpolitikan negara, namun turut berperan dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan nasib negara.

Pada saat itu usaha dari Jenderal A.H. Nasution belum diterima dan masih menuai kontroversi, sehingga perlu dikaji ulang supaya dapat diterima oleh seluruh kalangan. Kondisi politik yang terjadi pada saat itu semakin memanas dan khawatir apabila ABRI melancarkan sebuah kudeta. Usaha dari

Jenderal A.H. Nasution tidak cukup sampai disitu saja ia kembali merumuskan konsep Dwifungsi ABRI ketika acara dies natalis AMN (Akademi Militer Nasional) pada tanggal 11 November 1958 yang diselenggarakan di Magelang. Menurut Samego (dalam Putra, et al. 2021) Jenderal A.H. Nasution merumuskan konsep Dwifungsi ABRI yang dikenal dengan Jalan Tengah. Jalan Tengah disini berarti bahwa ABRI tidak ingin posisinya hanya dijadikan sebagai alat oleh pemerintah dimana secara keseluruhan didominasi oleh para sipil politik. Akan tetapi, A.H. Nasution tidak memiliki keinginan bahwa ABRI harus menguasai politik secara sepenuhnya. A.H. Nasution hanya menginginkan ABRI turut diikut sertakan ketika pemerintah sedang menyusun rancangan dan memutuskan kebijakan politik negara.

Pada pidatonya Nasution menjelaskan konsep Jalan Tengah yang dibuat olehnya, Nasution menciptakan sebuah konsepsi Jalan Tengah karena ia memiliki cita-cita dan harapan yang sangat besar bagi negara di masa yang akan datang. Konsepsi yang diciptakannya tersebut tidak langsung diterima oleh negara melainkan harus melewati beberapa pertimbangan. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Jenderal A.H. Nasution dalam memperkenalkan Dwifungsi ABRI supaya konsep yang diajukan olehnya dapat diterima. A.H. Nasution berusaha keras mengerahkan segala pemikiran dan strategi politiknya untuk memperjuangkan konsep Dwifungsi ABRI. Secara perlahan dengan berusaha memahami kondisi situasi politik yang ada di Indonesia pada akhirnya konsep Dwifungsi ABRI yang dicetuskan oleh Nasution diterima dan diakui oleh pemerintah. Cita-cita besar dari sang jenderal tersebut pada akhirnya dapat terwujud meskipun banyak sekali rintangan dan tantangan untuk menerapkannya, sehingga konsep ini menjadi konsep paling berharga dalam sejarah militer.

Awal Mula Keterlibatan Militer alam Kancah Politik Indonesia

Militer memiliki peranan yang sangat besar sejak awal terbentuknya pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bangsa ini. Dapat kita lihat peranan

militer sangat besar sejak sebelum Indonesia merdeka yang mana militer telah berjuang bersama rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Militer juga memiliki peranan yang sangat besar ketika masa revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Hal itu telah terlihat dengan jelas bahwa peranan militer sangat besar bagi bangsa Indonesia, sehingga memunculkan adanya justifikasi atas peranan militer yang telah dilakukan (Iswardi, 2000:15).

ABRI sangat bersifat profesional terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan otoritas negara Indonesia dari berbagai macam serangan, gangguan, maupun ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar negeri (Sofuan, 2022). Terbentuknya organisasi ABRI ini diawali dengan dibentuknya sebuah Badan Kemanan Rakyat (BKR) dan laskar-laskar rakyat yang dibentuk untuk mengabdikan kepada bangsanya. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia militer tidak terlibat dalam persoalan sosial politik tetapi fokus dengan tugas dan fungsinya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Awal mula keterlibatan militer dalam persoalan sosial dan politik yakni pada saat pemerintahan Presiden Soekarno ketika berlakunya sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Anwar, 2018).

Pada era Demokrasi Terpimpin diterapkannya sebuah kemerdekaan berpolitik dengan memperoleh kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kebebasan tersebut diberlakukan setelah adanya Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945 (Anwar, 2018). Melalui adanya kebebasan mendirikan partai politik harapannya supaya masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya melalui organisasi partai politik yang didirikannya untuk menciptakan kehidupan negara yang lebih demokratis di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Adanya kebijakan kebebasan mendirikan partai politik justru menimbulkan permasalahan karena, partai politik justru lebih mengedepankan kepentingan golongan daripada kepentingan negara. Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui apabila

militer turut berkecimpung dalam politik. Akan tetapi karena adanya permasalahan sehingga Presiden Soekarno menyetujui militer untuk turut berkecimpung dalam politik. Menurut Said (dalam Rizqi, 2020) permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena tidak tercapainya kemufakatan ketika menentukan kebijakan sehingga menyebabkan kekacauan. Sehingga, munculnya militer dipanggung perpolitikan didasarkan pada lemahnya sipil politik dalam mengendalikan unsur-unsur kehidupan masyarakat (Sanit, 1995:49). Ide Dwifungsi ABRI yang diciptakan oleh A.H. Nasution kemudian diterima oleh Presiden Soekarno karena, dengan melibatkan militer kedalam bidang politik maka dapat membantu untuk menyetabilkan kekacauan yang sedang terjadi dan menyederhanakan partai-partai politik. Keterlibatan militer ke dalam politik pemerintahan negara menurut Harold Crouch dalam (Anwar, 2018) sebagian sejarahnya militer telah memainkan peranannya dalam ranah politik sejak beberapa bulan setelah kemerdekaan. Dengan demikian, dapat kita ketahui awal mula keterlibatan militer dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Setelah konsep dwifungsi ABRI ini berhasil diterima dan memperoleh dukungan, A.H. Nasution kemudian berpikir keras supaya konsep Jalan Tengah ini mendapatkan legitimasi paling kuat untuk peran keikutsertaan politik ABRI yang dapat dimungkinkan hanya melalui landasan konstitusional. Landasan konstitusional yang dibutuhkan dan diyakini mampu memberikan keyakinan bagi semua orang adalah melalui UUD 1945. Dalam kurun waktu satu minggu setelah A.H. Nasution menyampaikan pidatonya, Dewan Nasional segera menyelenggarakan sidang pada tanggal 19-21 November 1958 yang membahas mengenai golongan fungsional dalam pemerintahan Indonesia. Melalui penggolongan fungsional inilah yang kemudian memberikan penjelasan terkait posisi ABRI dalam perpolitikan di Indonesia (Putra, et al. 2021). ABRI digolongkan ke dalam golongan fungsional angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Selain itu, dalam golongan fungsional angkatan bersenjata juga mencakup

Organisasi Keamanan Desa (OKD), dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR). Dimasukkannya ABRI ke dalam golongan fungsional ke dalam kerangka konstitusional UUD 1945 telah menjadi dasar penguat keterlibatan ABRI dalam kancah perpolitikan serta sebagai kekuatan pertahanan, dan keamanan.

Penerapan Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru

Penerapan Dwifungsi ABRI atau yang dikenal dengan Jalan Tengah terjadi pada pemerintahan Presiden Soekarno yakni masa Demokrasi Terpimpin dan dijalankan sesuai konsep awal yang telah dibuat oleh Jenderal A.H. Nasution. Kemudian konsep Dwifungsi ABRI ini juga diterapkan ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto yakni pada masa Orde Baru. Tujuan awal dari konsep dwifungsi yakni militer tidak mendominasi segala aspek pemerintahan tetapi pada masa Orde Baru fungsi militer justru diperluas sehingga mendominasi segala aspek pemerintahan. Dwifungsi ABRI yang diimplementasikan pada masa Orde Baru diperluas sehingga ABRI tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, tetapi militer juga berhak untuk memegang dan mengatur kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara. Sebagai kekuatan sosial dan politik ABRI memiliki dua fungsi yakni fungsi dinamisor dan stabilisor (Bowo, 2022). Kedua fungsi tersebut memiliki tujuan yang sama sebagai usaha bela negara dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional bersama seluruh elemen masyarakat.

ABRI berfungsi sebagai dinamisor yakni kemampuan ABRI menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara ABRI dengan masyarakat. ABRI berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat dan mendorong masyarakat untuk turut serta melibatkan dirinya dalam pembangunan negara (Suryawan and Sumarjiana, 2020). Hal ini dapat kita lihat melalui adanya kebijakan ABRI masuk desa. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut yakni ABRI berusaha untuk turut serta berpartisipasi dalam melakukan pembangunan

di desa dalam rangka untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat guna memperkuat posisi militer dalam struktur pemerintahan (Purba, et al. 2022). Desa dipilih sebagai sasaran pembangunan karena dapat dijadikan sebagai penunjang usaha bela negara. Kebijakan ABRI masuk desa tersebut dilakukan dengan menempuh beberapa cara baik itu secara fisik maupun non fisik oleh para ABRI. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat memperbaiki sarana dan prasarana desa serta mengembalikan peranan lembaga yang ada di desa.

ABRI juga berfungsi sebagai stabilisator yakni ABRI memiliki kemampuan untuk menjalin terciptanya komunikasi dengan masyarakat sehingga mampu merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Para prajurit memiliki kesadaran nasional yang tinggi sehingga mampu menghambat adanya pengaruh negatif dari masuknya budaya dan nilai asing ke Indonesia. Hal itu juga didukung dengan sifat realistis dan pragmatis yang dimiliki oleh ABRI sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan pada kebermanfaatan nilai berdasarkan pada kepentingan nasional (Suryawan and Sumarjiana, 2020). Oleh karena itu, dapat dilakukan sebuah upaya untuk mengantisipasi adanya gejolak dan ketegangan yang ditimbulkan dari adanya pengaruh asing yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat ketika berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila hal tersebut tidak dapat diantisipasi oleh ABRI dikhawatirkan budaya dan nilai asing tersebut masuk kemudian merusak tatanan nilai yang telah berkembang di masyarakat.

ABRI juga memiliki fungsi kekayaan dalam (Suryawan and Sumarjiana, 2020); (Indonesia, 1983:65) yakni ABRI menugaskan kepada seluruh anggotanya di segala aspek kehidupan. ABRI turut serta dalam kegiatan masyarakat, karena tugas ABRI tidak hanya berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan saja. ABRI sebagai kekuatan sosial politik bersama dengan seluruh elemen

masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengisi kemerdekaan serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Fungsi sosial dan politik dari ABRI ditetapkan melalui ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966, TAP No. XXIV/MPRS/1966. Hal itu juga diperkuat dengan ketetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 26 dan 28 (Putra, et al. 2021). Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tersebut menjadi dasar penguat dari keterlibatan ABRI dalam kancah perpolitikan dan struktur pemerintahan.

Melalui adanya kebijakan politik kekayaan tersebut diidentikkan dengan politik pemerintah sehingga, ABRI diberikan peluang untuk ditugaskan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun ABRI diberikan tugas dalam struktur pemerintahan ABRI juga tetap menjalankan perannya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Seperti pernyataan Crouch dalam (Subari and Wahyu Hidayati, 2023) bahwa ABRI pada masa Orde Baru diberi wewenang untuk menjabat sebagai gubernur di instansi regional yakni di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Maka dari itu telah menunjukkan secara jelas bahwa militer diberikan kedudukan sebagai pejabat regional dalam birokrasi pemerintahan. menurut Nasution dalam (Jenkins, 2010:296) di bawah tirani kekuasaan Soeharto sistem wilayah menjadi dipolitisasi serta tunduk pada kebutuhan kelompok yang berkuasa. ABRI berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dijadikan sebagai alat yang dapat dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan dalam bidang stabilitas nasional peranan ABRI tersebut cukup dominan sehingga menyebabkan munculnya fraksi-fraksi dari ABRI. Padahal seharusnya tugas dan peran dari ABRI yakni menjaga kedaulatan negara Indonesia tanpa harus membentuk fraksi atau partai politik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru memberikan panggung kepada militer untuk berkecimpung dalam bidang sosial politik yakni; adanya anggapan dari beberapa kalangan bahwa militer memiliki tugas mengemban

amanat untuk menjadi penyelamat negara, adanya kepercayaan kepada militer bahwa mereka mempunyai identitas sebagai pelindung kepentingan negara, militer berperan sebagai stabilisator bagi negara, dan militer mengidentifikasi dirinya sendiri untuk menjadi pelindung dari kebebasan umum (Rajab, 2021). Selain itu menurut Cipta dalam (Hasudungan, 2021) militer diberikan peranan oleh Soeharto dalam bidang politik karena, kekuatan paling terorganisir dan solid sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat utama untuk melanggengkan kekuasaannya. Adanya faktor tersebut yang kemudian menjadikan militer mendominasi dalam struktur birokrasi dan parlemen sehingga disinyalir turut mempengaruhi kebijakan yang diputuskan. Lembaga legislatif kemudian dikendalikan oleh para anggota militer yang menduduki jabatan dalam parlemen atas perintah dari Presiden Soeharto sehingga apabila kebijakan yang dihasilkan dapat mengancam stabilitas pemerintahannya maka dapat diminalisir karena adanya peranan dari militer. Hal itulah yang kemudian menjadikan militer sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dari Presiden Soeharto, karena adanya kekuatan militer dalam parlemen mampu menjaga kestabilan sistem pemerintahan. Selain itu, dengan adanya militer dalam tubuh parlemen semakin memperkuat dan memperkokoh kedudukan dari militer itu sendiri dalam bidang sosial politik. Dwifungsi ABRI pada akhirnya dihapus seiring runtuhnya rezim Orde Baru (Anggriawan and Jatnika 2022, 172). Oleh karena itu, adanya perluasan peran dari militer tersebut menyebabkan terjadinya dominasi militer dalam struktur birokrasi yang menjadi sebuah bentuk implikasi dari diterapkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan politik negara Indonesia.

D. SIMPULAN

Dwifungsi ABRI atau yang dikenal dengan Jalan Tengah merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Jenderal A.H. Nasution ketika acara dies natalis AMN (Akademi Militer Nasional) pada tanggal 11 November 1958 yang diselenggarakan di

Magelang. Konsep Jalan Tengah berarti ABRI tidak ingin posisinya hanya dijadikan sebagai alat oleh pemerintah dimana secara keseluruhan dikuasai oleh para sipil politik. Militer menuntut untuk diikutsertakan dalam menentukan kebijakan yang dirumuskan oleh negara. Konsep Jalan Tengah tersebut kemudian diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Kemudian konsep tersebut diterapkan pada masa Orde Baru oleh Presiden Soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah suatu kebijakan dimana militer tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, tetapi militer juga berperan sebagai kekuatan sosial dan politik. Akan tetapi, pelaksanaan dari konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru menyimpang dari konsep awal yang diciptakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dengan diterapkannya kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru militer justru mendominasi disegala bidang termasuk dalam struktur birokrasi pemerintahan dan parlemen negara. Hal itu yang kemudian menyebabkan hubungan antara sipil dan militer menjadi tidak harmonis. Seharusnya antara sipil dan militer dapat membangun sebuah hubungan yang harmonis karena hubungan tersebut juga akan berdampak pada stabilitas pemerintahan suatu negara. Hubungan antara sipil dan militer harus diatur dengan baik karena hubungan antara sipil dan militer merupakan sebuah kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa tidak hanya kaum sipil dan militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggriawan, Vicky, and Yanuar Jatnika. 2022. *Biografi Adjeng Ratna Suminar Pikiran, Hati, dan Liku Kehidpannya*. Edited by Isa Agung Wicaksono, Annisa Permata Sari, and Almira Nindya Artha. Pertama. Yogyakarta: PT Nas Media Pustaka.

- Anwar. 2018a. "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia." *Adabiya* 20 (1): 23–46.
- Arie Bowo, Ferdian. 2022. "Politik Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 16.
- Fitri, Muhammad, and Heri Susanto. 2021. "Nilai Sosial Religi Tradisi Manopeng Pada Masyarakat Banyuur." *Kalpataru* 7 (2).
- Hasudungan, Anju Nufarof. 2021. "Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia sebagai Materi Pengayaan Kelas XII Sejarah Indonesia." *TARIKHUNA* 3 (2): 2797–3581.
- Indonesia, Angkatan Bersenjata. 1983. *Mimbar Kekayaan ABRI*. Departemen Pertahanan Keamanan, Staf Pembinaan Karyawan.
- Istiqomah, Ika Suci Fitriani, Ilvan Triyuda Pangestu, Lidia Milinia, Rinaldo Adi Pratama, and Ali Imron. 2022. "Urgensi Arsip Digital sebagai Bahan Rujukan Penelitian Sejarah di Era Pandemi Covid-19." *KARAKATOA* 1 (1).
- Iswandi. 2000. *Bisnis Militer Orde Baru Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter*. Edited by Wuly Anisah. Kedua. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jenkins, David. 2010. *Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Edited by Uswatul Chabibah. Pertama. Depok: Komunitas Bambu.
- Nisa, Septiani Chairul. 2023. "Implementasi Kesetaraan Gender Wanita Kelas Atas dalam Sejarah Perjuangan Wanita Indonesia." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4 (1): 42–54. <https://doi.org/10.22146/jwk.6396>.
- Purba, Rona Meilani, Henry Susanto, Yusuf Perdana, and Yustina Sri Ekwandari. 2022. "Dwifungsi ABRI dalam Sosial Politik sebagai Gerakan Akar Rumput pada Masa Orde Baru." *History Education and Cultural Studies* 1 (1).
- Putra Peza Pramana, Herman, dan Safri Mardison. 2021. "Kontribusi Jenderal Besar A.H. Nasution terhadap Dwifungsi ABRI (1958-1998)." *Jurnal Cerdas Mahasiswa* 3 (2): 240–53.
- Rajab, Budi. 2021. "Pembentukan Modal Sosial dan Kepentingan Ekonomi-Politik Negara." *Jurnal Interaksi Sosiologi* 1 (1).
- Rizqi, Clara Venia Leilafatkur. 2020. *Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Sanit, Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Delapan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayono, Joko. 2021. "Langkah-Langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital." *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 15.
- Sofuan, Tazkia Kamila. 2022. "Rivalitas KNIL dan PETA Dalam Sejarah Kemiliteran Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan." *Journal of History Education and Culture* 79 (2): 2686–0082. <https://doi.org/10.32585/keraton.v1i1.xxx>
- Subari, and Sri Wahyu Hidayati. 2023. "Sipil dan Militer: Legitimasi Kekuasaan dalam Pusaran Demokratisasi di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)" 6 (6): 4347–57. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>.

Suryawan, I Putu Nopa, and I Ketut Laba Sumarjana. 2020. "Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI." *Santiaji Pendidikan* 10 (2).

Syamsul Hilal, Afrizal Hendra, Tri Legionosuko, Helda Risman. 2022. "Pasang Surut Hubungan Militer di Indonesia dan Tantangannya pada Masa Depan NKRI." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (10).